

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Studi mengenai kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) dewasa ini telah banyak diperhatikan, baik dari kalangan akademisi berbagai lintas ilmu hingga masyarakat awam. Dalam fokus studi sosiologi gender dan seksualitas, para cendekiawan feminis dan *queer* telah memberikan kritik berpengaruh terhadap metode-metode yang umumnya digunakan untuk mengkaji paradigma dominan yang digunakan pada pusat disiplin untuk memahami pengalaman biner laki-laki, perempuan, maupun heteroseksual sebagai panduan untuk mengevaluasi signifikansi dan makna kehidupan bagi mereka yang menjadi bagian dari kelompok LGBT (Schilt & Lagos, 2017).

Berkembangnya ruang diskusi serta pemberitaan mengenai kelompok LGBT tidak kemudian menghapuskan realita bahwa individu-individu dalam kelompok tersebut berhasil keluar dari kondisi rentan. Transpuan¹ sebagai bagian dari kelompok LGBT betapa pun belakangan ini gencar mengupayakan dibukanya ruang untuk berinteraksi sekaligus menyuarakan pendapat sebagai upaya pemenuhan hak mereka yang selama ini lalai diperhatikan oleh negara, diskriminasi maupun prasangka buruk masih saja menjadi hal yang umum mereka temui dalam masyarakat yang mengadopsi pola pikir heteronormatif juga cisnormatif. Terawatnya pemikiran tersebut menjadikan kelompok transpuan semakin tersingkir dan dianggap sebagai kelompok pendosa yang menyimpang akibat hanya diakuinya keberadaan dua jenis individu, yakni perempuan dan laki-laki (Kartinaningdryani, 2019).

¹ Terminologi transpuan sendiri belum tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berbeda dengan transgender yang oleh KBBI didefinisikan sebagai individu yang mengalami transisi pada identitas gendernya, terminologi transpuan secara khusus menjelaskan kondisi individu yang mengalami transisi yang mulanya seorang laki-laki menjadi seorang perempuan.

Berbagai perdebatan mengenai kejelasan identitas seorang LGBT atau dalam studi ini khususnya seorang transpuan dimulai dari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai SOGIEC atau *sexual orientation, gender expression, and gender identity*. Edukasi terpenting mengenai hal tersebut dapat dimulai pada penjelasan perbedaan seks dan gender. Seks mengacu pada perbedaan kondisi fisik atau psikologis seorang individu yang ditentukan berdasarkan dengan karakteristik sistem reproduksi dan hal yang kodrati. Berbeda dengan seks, gender lebih mengacu pada perbedaan sosial dan budaya yang diasosiasikan pada individu laki-laki dan perempuan (Little & McGivern, 2014). Berdasarkan penjelasan di atas, penting untuk dipahami bahwa seks seseorang, seperti yang ditentukan oleh kondisi biologisnya, tidak selalu sesuai dengan gendernya yang terbentuk seiring dengan tumbuh-kembang individu tersebut.

Indonesia secara umum masih didominasi oleh penganut budaya ketimuran, sekaligus menjadi negara dengan penduduk yang didominasi dengan keyakinan terhadap kerangka berpikir heteronormatif yang menentang keberadaan individu dengan identitas gender yang dianggap menyimpang. Seiring dengan terciptanya keyakinan dan narasi mengenai heteronormativitas dan binerisme, hal tersebut justru menjustifikasi terjadinya hegemoni yang selama ini dirasakan oleh kelompok LGBT. Binerisme kemudian dianggap sebagai kondisi paling alamiah bahkan absolut dalam suatu masyarakat, sehingga apabila dijumpai sosok perempuan yang bertindak seperti laki-laki maupun sebaliknya, hal tersebut akan dikategorikan sebagai suatu penyimpangan (Candraningrum, 2015). Berkaitan dengan faktor tersebut, keberadaan seorang transpuan sebagai bagian dari LGBT dalam masyarakat sering menjadi isu yang diperdebatkan di Indonesia.

Transpuan masuk dalam kategori transgender yang dipahami sebagai identitas gender seorang individu yang tidak sesuai dengan kategori seks biologis yang teridentifikasi pada saat individu tersebut lahir. Transpuan sendiri menggambarkan individu yang terlahir dengan alat reproduksi jantan (penis)

kemudian diberi label sebagai laki-laki, namun mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai perempuan². Sementara beberapa transpuan memiliki *privilege* untuk menjalani operasi alat kelamin, kemudian disebut sebagai transeksual, bahkan melakukan operasi lain yang mendukung *passing privilege*, nyatanya masih banyak perjuangan yang harus dilalui oleh transpuan di masyarakat untuk mampu “lulus” diakui dan diterima sebagai seorang perempuan.

Membahas mengenai keterbukaan masyarakat dalam menerima keberadaan transpuan di Indonesia merupakan tantangan tersendiri. Pada tahun 2013 sekelompok aktivis, akademisi, dan elemen masyarakat lain di Indonesia pada bekerja sama dengan USAID (*US Agency for International Development*) dan UNDP (*United Nations Development Programme*) melaksanakan penelitian mengenai kehidupan kelompok LGBT di Asia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terpilih menjadi lokasi dilaksanakannya penelitian tersebut mengingat banyaknya jumlah kelompok LGBT di Indonesia yang masih ter subordinasi. Pernyataan tersebut selaras dengan hasil riset yang dilakukan oleh Media Saiful Mujani *Research and Consulting* yang menyatakan bahwa sebanyak 87,6 persen masyarakat Indonesia menganggap kelompok LGBT sebagai ancaman³.

Dilaksanakannya penelitian tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil sidang PBB yang membahas mengenai isu kesetaraan gender, kependudukan, dan Hak Asasi Manusia. Dijelaskan bahwa dalam mengupayakan terpenuhinya hak terhadap kaum LGBT sangat berkaitan pada kebijakan pemerintah, sikap sosial budaya dan agama, hukum, pendidikan, partisipasi politik, dan media untuk memiliki keterbukaan dalam melibatkan kelompok LGBT agar kelak terdapat representasi yang lebih inklusif pada seluruh bentuk keberagaman masyarakat yang terdapat di Indonesia (Halim & Liang, 2013).

² N. H. Perwitasari, “Apa Itu Transpuan yang Jadi Korban Prank Ferdian Paleka?”, Tirta, diakses melalui <https://tirta.id/apa-itu-transpuan-yang-jadi-korban-prank-ferdian-paleka-fjC7> pada 23 April 2021

³ Ahmad Faiz Sani, “Survei SMRC: 87,6 Persen Masyarakat Menilai LGBT Ancaman”, Tempo, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1053909/survei-smrc-876-persen-masyarakat-menilai-lgbt-ancaman/full&view=ok> pada 23 April 2021

Upaya penegakan HAM yang semestinya telah dijamin oleh negara bagi seluruh rakyatnya tanpa mempertimbangkan perbedaan orientasi seksual dan identitas gender nyatanya tidak berlaku bagi kelompok LGBT, terlebih lagi bagi transpuan. Negara Indonesia sebagai negara yang dalam praktik kenegaraannya melibatkan unsur keagamaan, bahkan didominasi oleh kekuatan agama, secara tidak langsung mempengaruhi terciptanya narasi *transphobia* akibat tingginya angka kebencian yang didasari oleh argumen keagamaan. Nasib kelompok transpuan menjadi kian tersudut dan terabaikan akibat banyaknya ujaran kebencian yang memberikan stigma bahwa mereka merupakan sekelompok pendosa. Siaran Pers Komnas Perempuan berjudul “Kekerasan terhadap Transpuan” yang dirilis pada 6 Mei 2020 lalu menyorot kehidupan transpuan yang semakin dipersempit dalam memperoleh hak untuk hidup dengan layak. Pada tahun 2018 sendiri tercatat sebanyak 5 kasus pembunuhan transpuan, angka kekerasan itu semakin meningkat pada tahun 2019 dimana sebanyak 6 transpuan kembali menjadi korban pembunuhan. Sepanjang 12 tahun (2006-2018) tercatat sebesar 88 persen tindak kekerasan yang diterima oleh kelompok transpuan di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia dengan tingkat kekerasan tertinggi terhadap kelompok LGBT⁴.

Sebagai kelompok yang telah menghadapi stigma dan diskriminasi dalam waktu yang sangat lama akibat dilanggengkannya hegemoni pemikiran heteronormatif sebagai *desired social norm*, kelompok transpuan harus menerima dampak berupa terbatasnya akses bagi mereka untuk memperoleh hak-hak sebagai warga negara dengan semaksimal mungkin seperti hak mengakses layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesempatan bekerja. Faktor-faktor tersebut menyebabkan terjebakanya kelompok transpuan dalam lingkaran kemiskinan yang telah lama mereka hadapi mengingat banyak dari mereka bertahan hidup dengan mengandalkan sektor informal, lingkup

⁴ Zakki Amali, “Kasus Mira: Kejanggalan Penyidikan Polisi. Transpuan Berhak Hidup”, Tirto, diakses melalui <https://tirto.id/kasus-mira-kejanggalan-penyidikan-polisi-transpuan-berhak-hidup-eL8r> pada 23 April 2021

pekerja seks komersial, bahkan tidak jarang berakhir sebagai seorang pengangguran karena ditutupnya kesempatan bagi mereka untuk mampu berkiprah pada ranah formal.

Kelompok transpuan kian mengalami kerentanan akibat adanya garis ketidaksetaraan yang terpelihara dalam waktu yang lama akibat konstruksi sosial masyarakat yang hanya mengakui keberadaan dua gender absolut – menyebabkan kelompok transpuan sebagai pelaku transisi dianggap menyalahi keadaan yang “sewajarnya.” Terlebih lagi konstruksi ini terjaga dan diterapkan oleh pemegang kekuasaan yang menciptakan diskriminasi secara struktural dengan mengembangkan wacana heteronormatif yang sarat dengan hierarki sosial yang melibatkan gender dan minoritas seksual, keduanya telah lama yang “dibesarkan” dalam sistem semacam itu akan secara sadar dan tidak sadar akan menginternalisasi hierarki tersebut. Pada beberapa kasus berlangsungnya tindak diskriminatif dan stigmatisasi yang berlangsung dalam waktu lama justru mendorong kelompok transpuan untuk semakin mengisolasi dirinya sendiri dan menginternalisasi stigma kepada dirinya sendiri sehingga mereka enggan melakukan perlawanan (Higa et al., 2008).

Pada jurnal berjudul *Cisgendered Organizations: Trans Women and Inequality in the Workplace* (Yavorsky, 2016) dijelaskan bagaimana cisgenderisme, ideologi seksisme yang menyangkal juga merendahkan identitas gender yang dianggap “patologis” karena tidak sesuai dengan gender yang ditetapkan sesuai dengan jenis kelamin saat individu tersebut dilahirkan. Ideologi cisgenderisme menjadikan kelompok transpuan dipandang inferior dibandingkan dengan mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai cisgender, hal tersebut berujung pada diterimanya ketidakadilan yang dirasakan oleh transpuan seperti minimnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Umumnya tempat kerja memang dipahami sebagai tempat dimana banyak orang berkumpul dan menyelesaikan pekerjaannya guna memperoleh upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tidak sedikit tempat kerja yang penerimaannya begitu terbatas pada kelompok

masyarakat *cisgender*, menjadikan semakin sempitnya ruang bagi kelompok transpuan untuk memperoleh kesempatan menjalani pekerjaan yang lebih menjanjikan.

Bersamaan dengan kondisi pandemi yang telah berlangsung selama dua tahun, kondisi transpuan yang semula telah masuk pada kategori rentan kini berpotensi semakin terperosok pada kondisi yang bahkan mengancam kelangsungan hidup mereka akibat hilangnya lapangan pekerjaan, resiko terpapar virus yang lebih besar, hingga menurunnya pendapatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-harinya. Pada masa pandemi ini, banyak kelompok transpuan harus menerima fakta bahwa pekerjaan mereka yang membutuhkan kontak dengan banyak orang harus terhenti untuk sementara waktu. Shinta Ratri, Kepala Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta, menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan bagi kelompok transgender sebanyak 60 persen⁵.

Hidup dengan bergantung pada bantuan yang diberikan oleh organisasi atau yayasan yang bergerak pada bidang kemanusiaan, atau sesekali oleh lembaga pemerintahan merupakan alternatif yang saat ini sangat dibutuhkan oleh kelompok transpuan agar dapat bertahan hidup. Meskipun pemerintah telah menetapkan distribusi dana bantuan sosial bagi kelompok rentan selama pandemi, masih belum banyak kelompok transpuan yang dapat menikmati bantuan tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya Jakarta menjelaskan kesulitan yang dialami oleh transpuan dalam memperoleh hak kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran (Praptoraharjo et al., 2015). Adapun hal tersebut selaras dengan realita yang dialami oleh komunitas transpuan di Kabupaten Tangerang, Banten dimana sebanyak 40 persen dari 700 transpuan

⁵ Aisyah Llewellyn, "Empty salons: Indonesia's transgender women count cost of COVID", Aljazeera, diakses melalui <https://bit.ly/3tHQTH5> pada 20 April 2021

yang tergabung dalam komunitas tersebut belum memiliki e-KTP atau data kependudukan⁶. Kondisi tersebut menyebabkan terhalangnya upaya bagi transpuan dalam menerima hak-hak masyarakat pada umumnya, juga bantuan sosial resmi dari pemerintah yang semestinya dapat membantu menyokong kehidupan mereka khususnya pada masa pandemi saat ini.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, melalui penelitian ilmu politik dengan judul *Avoiding the spotlight: public scrutiny, moral regulation, and LGBT candidate deterrence* (Wagner, 2021) membahas kelompok LGBT yang telah lama menerima kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum di negaranya akibat kosongnya representatif pembuat kebijakan yang memiliki keberpihakan kepada kelompok marginal seperti mereka. Berbagai produk hukum seperti kebijakan publik dan undang-undang dasar negara dianggap hanya menguntungkan kelompok biner karena kursi pemerintahan dan pembuat kebijakan cenderung didominasi oleh individu-individu yang masuk dalam kategori biner, sehingga kebutuhan pemenuhan hak LGBT sebagai bagian dari masyarakat terabaikan. Dilanjutkan dengan penelitian berjudul *Counter-Hegemonic Citizenship: LGBT Communities and the Politics of Hate Crimes in Canada* (Field, 2007) yang mengkaji mengenai bagaimana kelompok minoritas seperti transgender tidak mampu menikmati hak warga negara dan ditolak untuk menerima hasil sebagai *substantive citizenship* dikarenakan berkembangnya konstruksi yang menempatkan kelompok transgender sebagai kelompok yang terdiri atas individu “lain” yang tidak memenuhi norma sosial. Kelompok transgender harus berhadapan dengan banyak tantangan dalam melakukan perlawanan sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan publik dan produk hukum yang tidak mampu menjamin terpenuhinya hak hidup mereka.

⁶ Sasmito Madrim, “Transpuan di Indonesia, Sulit Akses Layanan Publik”, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/transpuan-di-indonesia-sulit-akses-layanan-publik-/5899331.html> pada 01 Juni 2021

Dampak kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok transpuan dapat dilihat pada data mengenai kerentanan kelompok transpuan Indonesia dalam bertahan hidup di masa Pandemi yang dinyatakan oleh Yulianus Rettblaut, Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia. Dijelaskan bahwa kondisi transpuan yang semula telah terpuruk menjadi semakin terpuruk sejak berkembangnya pandemi dan diberlakukan PSBB. Sebanyak 80 persen transpuan, khususnya dalam kategori lansia harus kehilangan mata pencaharian dan ruang gerak karena banyaknya ancaman yang muncul akibat pandemi⁷. Mereka yang mulanya bekerja sebagai pengamen, perias di salon, dan pekerja seks terpaksa harus membatasi aktivitas mereka karena memperhatikan potensi tertular virus Covid-19 dan takut tertangkap oleh Satpol PP.

Penelitian mengenai sudut pandang komunitas LGBT dalam memahami pergumulan yang mereka hadapi selama pandemi dibahas pada jurnal kesehatan psikoseksual berjudul *“The Untold Side of COVID-19”: Struggle and Perspectives of the Sexual Minorities* (Banerjee & Nair, 2020). Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana kelompok LGBT, salah satunya merupakan transpuan berpotensi menghadapi dampak jangka panjang akibat terjadinya pandemi. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh pandemi antara lainnya meliputi masalah sosio-ekonomi, munculnya ketidakadilan berbasis gender, rendahnya kesehatan seksual, kian memburuknya kesehatan mental, meningkatnya stigma, dan semakin tersudutkannya mereka dari hubungan sosial masyarakat. Upaya untuk memastikan terpenuhinya hak transpuan sebagai masyarakat merupakan tanggung jawab yang tidak semestinya dipandang sebelah mata oleh seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali pemerintah atau pemangku kebijakan.

Begitu banyaknya ancaman atau kemungkinan dampak buruk yang disebabkan oleh berkembangnya penyebaran virus Covid-19 hingga saat ini,

⁷ Ayomi Amindoni, “Transgender: Perjuangan transpuan di masa pandemi virus corona - 'Hidup seperti orang yang mati perlahan-lahan’”, diakses melalui <https://bbc.in/3sIG5XC> pada 20 April 2021

menyebabkan kelompok transpuan harus melakukan upaya-upaya resistensi guna bertahan hidup. Menjadi kelompok yang telah lama termarginalkan dan terdiskriminasi, transpuan mau tidak mau harus mampu terbiasa beradaptasi dengan segala hambatan yang harus mereka hadapi. Kondisi masyarakat Indonesia yang belum banyak menerima kehadiran mereka tidak kian mempermudah upaya mereka untuk dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya yang dianggap normal. Kelompok transpuan harus menyadari adanya kebutuhan bagi mereka untuk beradaptasi dengan ekstra, membangun kesadaran, dan melakukan upaya perlawanan untuk melawan sentimen dan ketidakadilan yang kian kentara selama pandemi Covid-19.

Penelitian sosiologi yang berjudul “*Spilling the T on Trans-Misogyny and Microaggressions: An Intersectional Oppression and Social Process Among Trans Women*” (Arayasirikul & Wilson, 2019) menjelaskan proses sosial yang dilalui oleh kelompok transpuan dalam menghadapi opresi dan diskriminasi akibat dipertahankannya ideologi seksisme cisgender. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dijelaskan bahwa dengan adanya stratifikasi sosial dan mikro agresi, kedua hal tersebut berkontribusi pada terjadinya disparitas gender menyebabkan meningkatnya tingkat stress pada kelompok transpuan. Timbulnya penolakan secara terus menerus menyebabkan mereka harus melakukan *passing* untuk mampu memperoleh kesempatan lebih banyak dalam mendapatkan hak mereka. *Passing* mengacu pada praktik dimana seseorang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai bagian dari identitas lain yang berbeda dari identitasnya yang sebenarnya. Pada kasus ini, mereka melakukan proses *passing* dengan berusaha mengadaptasi dirinya sebagai perempuan tulen.

Meskipun *passing* dianggap sebagai bentuk resistensi agar mereka dapat memperoleh hak mereka atau terhindar dari diskriminasi atau opresi, *passing* justru menjadikan kelompok transpuan sebagai seorang korban dimana mereka tidak mampu mengekspresikan identitas gendernya secara terbuka karena adanya ketakutan untuk dikesampingkan dalam kehidupan bermasyarakat. Alih-alih memberikan jalan bagi para transpuan untuk menjadi dirinya sendiri

guna mengedukasi orang lain mengenai keberadaan mereka, mereka secara terpaksa menyembunyikan identitas mereka dengan mengikuti tuntutan orang lain, yakni dengan mengambil identitas seorang biner atau mereka yang “normal.” Begitu pula bahwa tidak semua transpuan memiliki “*passing privilege*” yang mana tidak jarang justru menimbulkan diskriminasi di dalam kelompok transpuan itu sendiri.

Pada penelitian ini yang berjudul “*Counter-Hegemony* Kelompok Transpuan Surabaya Dalam Melawan Diskriminasi di Masa Pandemi Covid-19” berfokus pada bagaimana bentuk *counter-hegemony* yang dilakukan oleh transpuan di Surabaya dalam melawan diskriminasi atau ketidakadilan, terlebih pada masa pandemi Covid-19 yang kini menempatkan mereka pada kondisi yang semakin rentan. *Counter-hegemony* ini tidak hanya berfokus pada upaya resistensi yang dilakukan oleh transpuan di Surabaya dalam bertahan hidup selama pandemi dengan melawan tindak hegemoni heteronormatif yang mempersempit akses mereka dalam memperoleh kesempatan hidup layak, melainkan juga pada upaya mereka membangun kesadaran untuk menguatkan komunitas mereka agar mampu melakukan perlawanan terhadap kondisi sosial yang telah lama mengesampingkan hak mereka sebagai masyarakat.

I.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam latar belakang, adapun fokus penelitian pada studi yang berjudul “*Counter-Hegemony* Kelompok Transpuan Surabaya Dalam Melawan Diskriminasi di Masa Pandemi Covid-19” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *counter-hegemony* yang dilakukan kelompok transpuan Surabaya di tengah pandemi Covid-19?
2. Apakah kesadaran kolektif mampu mengurangi kerentanan transpuan di masa pandemi Covid-19?

I.3. Tujuan Penelitian

Hegemoni heteronormatif yang telah dilanggengkan dalam waktu yang lama di Indonesia begitu berpengaruh pada kehidupan transpuan yang selama ini direndahkan posisinya dan disepelkan haknya, seakan tidak cukup memprihatinkan, pandemi Covid-19 justru meningkatkan kerentanan mereka dalam upaya bertahan hidup. Berdasarkan fokus penelitian studi ini bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk *counter-hegemony* kelompok transpuan di Surabaya dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang semakin memperburuk kondisi kehidupan mereka. Adapun yang kedua adalah untuk memahami efektivitas dari terbangunnya kesadaran kolektif sebagai upaya menciptakan kekuatan komunitas bagi kelompok transpuan dalam menghadapi kondisi sosial yang belum memperhatikan kebutuhan mereka, khususnya dalam masa pandemi Covid-19.

I.4. Manfaat Penelitian

I.4.1. Manfaat Akademis

Studi ini diharapkan mampu memperkaya wawasan khususnya pada kajian yang berkenaan dengan isu gender, serta memberikan kontribusi akademis pada bidang ilmu sosiologi yang membahas mengenai upaya melakukan *counter-hegemony* dengan didukung oleh terbangunnya kesadaran dan kekuatan komunitas yang dilakukan oleh kelompok gender minoritas, dalam hal ini transpuan. Selain itu, studi ini diharapkan mampu menambah informasi dan kajian teoritis tentang terbentuknya kesadaran kolektif dan *counter-hegemony* kelompok gender minoritas.

I.4.2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, studi ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru mengenai lika-liku kehidupan seorang transpuan yang menetap di Indonesia dalam melakukan upaya *counter-hegemony* dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkan hegemoni heteronormatif dan harus mereka hadapi sebagai kelompok terdiskriminasi. Melalui

pengalaman-pengalaman yang mereka bagikan, diharapkan dapat timbul pemahaman baru untuk kemudian muncul sebuah upaya membuka diri pada keberagaman gender dan mengeliminasi kondisi sosial yang enggan merangkul mereka sebagai bagian dari masyarakat, juga untuk menghapuskan konstruksi nilai gender yang bias terhadap kelompok biner. Terlepas oleh identitas gendernya yang dianggap menyalahi norma-nilai yang ada dalam masyarakat, patut dipahami bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan jaminan untuk dapat hidup layak, utamanya pada kondisi pandemi.

Bagi pemerintah, melalui studi mengenai kehidupan seorang transpuan di Indonesia yang selama ini mengalami hambatan dalam memperoleh akses fasilitas atau layanan, diharapkan mampu memberikan pandangan baru mengenai adanya kebutuhan untuk membentuk kebijakan dan narasi yang sudah sewajarnya mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang identitas gender mereka. Mereka membutuhkan adanya wakil rakyat dan pemangku kebijakan yang dapat memperhatikan kebutuhan dan menjadi representatif dengan merangkul dan menciptakan ruang aman bagi mereka alih-alih mendiskreditkan mereka sebagai warga negara di Indonesia.

I.5. Tinjauan Pustaka

I.5.1. Studi Terdahulu

Studi mengenai dampak pandemi Covid-19 pada semakin dilanggengkannya hegemoni heteronormatif, khususnya yang dirasakan oleh kelompok gender minoritas memang relatif baru dan belum banyak dilakukan mengingat pandemi baru saja berlangsung pada permulaan tahun 2019 lalu. Meski begitu, terdapat beberapa peneliti dari fokus studi utamanya pada bidang kesehatan masyarakat dan sosiologi telah melakukan kajian mengenai bagaimana pandemi Covid-19 memberikan dampak pada

munculnya sikap diskriminatif dan meningkatnya kerugian yang dirasakan oleh kelompok gender minoritas, juga transpuan.

Penelitian mengenai meningkatnya fenomena diskriminatif terhadap kelompok gender minoritas dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Pirtle dan Wright (2021). Penelitian tersebut dilakukan untuk menjelaskan mengenai bagaimana pandemi Covid-19 di Amerika alih-alih mendukung terbentuknya integrasi antar seluruh elemen masyarakat, fenomena diskriminasi yang dirasakan oleh kelompok gender minoritas justru semakin berkembang akibat terpupuknya sistem dan struktur masyarakat yang telah lama menormalisasi ketidakadilan berdasarkan gender. Mengangkat isu mengenai rasisme struktural gender, penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis interseksi tersebut menjelaskan bagaimana penindasan oleh sistem berdasarkan ras dan gender semakin menambah beban pada kelompok gender minoritas, utamanya bagi mereka yang memiliki latar belakang ras yang minoritas.

Kelompok gender minoritas telah lama menjadi korban marginalisasi, kini dengan adanya pandemi mesti berusaha ekstra untuk mampu memperoleh bantuan dari pemerintah yang malangnya masih menganut sistem bias gender berpihak pada kelompok *cisgender* atau mereka yang biner. Adapun bantuan seperti jaminan untuk mendapatkan akses tempat tinggal, kesehatan, dan pekerjaan belum banyak menyentuh kelompok masyarakat minoritas gender. Hal tersebut memberikan efek domino yang menyebabkan semakin tingginya resiko terkena dampak jangka panjang pandemi Covid-19 tanpa adanya akses untuk melakukan upaya mitigasi untuk melindungi diri guna bertahan hidup ditengah-tengah pandemi.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Ruprecht, et al. (2021) dengan mengambil setting sosial di Chicago dengan menggunakan studi kuantitatif melalui survei dan *rapid response* yang melibatkan responden yang berasal dari kelompok dengan orientasi seksual, identitas gender, dan etnis berbeda menunjukkan bahwa dengan berkembangnya penyebaran virus

Covid-19 berkontribusi pada semakin berkembangnya disparitas khususnya pada kelompok gender minoritas. Tidak diperolehnya akses pada asuransi kesehatan dan bantuan memperoleh pangan diakibatkan oleh bertahannya diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi secara struktural merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kelompok gender minoritas, sebagai kelompok termarginalisasi tidak mampu mendapatkan penanganan secara profesional, bahkan bantuan sosial ketika mereka merasakan dampak dari pandemi Covid-19.

Meski memilih fokus kajian pada disparitas yang terjadi selama pandemi Covid-19, hasil menunjukkan bahwa disparitas terhadap kelompok gender minoritas di Chicago sendiri telah berlangsung sejak lama karena sikap *transphobia* dan pengasingan secara struktural yang membedakan kesempatan perolehan hak jaminan untuk hidup lebih baik diantara para kelompok heteroseksual atau "*the normals*" dan mereka yang masuk dalam kategori homoseksual atau transgender. Oleh faktor tersebut, kondisi sosial yang terjadi saat ini justru semakin membangun jarak yang memisahkan kelompok gender minoritas dengan mereka yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya investasi secara struktural yang bertujuan menghapus sistem sosial yang condong mengesampingkan upaya pemenuhan hak hidup kelompok minoritas, tidak hanya pada masa pandemi namun juga untuk menangani masalah disparitas dalam jangka panjang.

Isu *transphobia* yang terjaga secara struktural dan semakin bertumbuh subur pada masa pandemi Covid-19 turut dibahas pada penelitian yang dilakukan oleh Sell dan Krims (2021) di Amerika Serikat. Lebih dari satu tahun sejak pandemi Covid-19 mulai berkembang di Amerika Serikat diiringi dengan masifnya pemberitaan sekaligus pendataan mengenai dampak dari cepatnya penyebaran virus, belum tercatat satu pun data yang mendokumentasikan dampak pandemi Covid-19 pada masyarakat gender minoritas yang turut mencakup transgender. Kelompok masyarakat gender

minoritas sejatinya merupakan kelompok paling rentan untuk tertular virus Covid-19, apalagi jika kita mempertimbangkan kelompok lainnya yang juga berjuang melawan penyakit HIV/AIDS dan penyakit bawaan lainnya. Rendahnya kesempatan bagi mereka dalam mengakses layanan kesehatan yang telah difasilitasi oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab minimnya data akan seberapa besar pengaruh pandemi bagi kelompok gender minoritas. Permasalahan tersebut berkaitan dengan diskriminasi yang telah terpola dalam waktu lama dan rendahnya inisiatif dari pemangku kebijakan untuk menaruh perhatian pada masyarakat gender minoritas. Dampak dari adanya diskriminasi secara struktural lambat laun turut mempengaruhi dunia medis yang semestinya menjadi wilayah yang inklusif, terlebih lagi bagi kelompok marginal seperti masyarakat gender minoritas.

Kelompok gender minoritas seperti transgender selama ini telah menjadi korban utama dari ketidakadilan struktural yang dalam kasus ini dikenal sebagai *structural transphobia*. Pada studi yang dilakukan oleh Kanamori dan Xu (2020) menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan sebanyak 400 *sample* dapat diketahui bagaimana meskipun pada sepanjang tahun 2015 hingga saat ini penerimaan publik di Amerika Serikat terhadap kelompok transgender menjadi lebih terbuka, diskriminasi dan sentimen buruk yang dilayangkan kepada kelompok transgender masih saja umum ditemui. Berbagai bentuk kejahatan seperti ujaran kebencian, serangan secara fisik, bahkan pembunuhan merupakan hal-hal yang harus diantisipasi oleh kelompok transgender di sepanjang hidupnya.

Salah satu faktor terbesar yang berpengaruh pada tingginya angka *transphobia* terletak pada adanya fundamentalisme agama yang turut bermain pada ruang lingkup pemerintahan. Situasi tersebut tentunya sangat lekat dengan kondisi yang saat ini kita temui di Indonesia tentang bagaimana kelompok agamis banyak memainkan narasi yang memupuk diskriminasi kepada transgender akibat label “pendosa” bahkan “menyalahi kodrat,” menjadikan semakin sempit terciptanya ruang keterbukaan dalam

memunculkan kebijakan mengenai akses layanan publik yang harus lebih menjangkau kepada seluruh kelompok masyarakat, utamanya transgender.

Penelitian mengenai upaya kelompok transpuan membangun resistensi dalam menghadapi dampak negatif pandemi Covid-19 juga dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Rabines dan Bencich (2021). Penelitian tersebut memahami resistensi berbasis komunitas sebagai bentuk perlawanan dapat menekan dampak pandemi Covid-19. Melalui penelitian yang dilakukan dengan metode *focus group discussion* dan observasi, kelompok transpuan dalam upaya membangun resistensi berbasis komunitas mengalami hambatan yang diakibatkan oleh perbedaan latar belakang baik secara struktural kultural, juga minimnya interaksi sosial yang berdampak pada menurunnya hubungan kepercayaan antar seorang pemimpin dengan mereka yang dianggap tidak cukup seajar.

Pada penelitian tersebut, seorang pemimpin memiliki peran penting untuk mendorong kelompok transpuan untuk berani bergerak dan mengungkapkan kesulitan yang mereka hadapi selama pandemi Covid-19. Namun karena hambatan di atas, kelompok transpuan di Lima, Peru mengalami kesulitan membangun jaringan antar komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Perbedaan kultur dan hierarki antar kelompok transpuan satu dengan transpuan yang lain menyebabkan perbedaan cara pandang dalam melakukan resistensi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Adapun penelitian lain yang turut mengkaji bagaimana pandemi Covid-19 menimbulkan tantangan-tangan baru bagi kelompok LGBT dilakukan oleh Al-Ali (2020). Penelitian tersebut berfokus pada upaya-upaya mempertahankan gerakan feminisme di negara – negara Selatan selama pandemi Covid-19. Gerakan feminisme tidak hanya memperjuangkan kepentingan perempuan, melainkan juga memperhatikan siapa saja yang mengalami diskriminasi berbasis gender oleh sistem, termasuk mereka yang menjadi bagian kelompok LGBT. Dalam kondisi pandemi yang semakin

mempersempit ruang gerak komunitas, para feminis berhadapan dengan berbagai tantangan dan dilema dalam proses membangun solidaritas untuk menghadapi tantangan yang dialami oleh mereka yang terdampak pandemi.

Pandemi Covid-19 secara tidak langsung berkontribusi pada meningkatnya kemiskinan, ketidakadilan, dan kerentanan bagi berbagai kelompok, utamanya yang telah lama menjadi korban marginalisasi. Bagi kelompok yang ber-*privilege* menjalankan ketentuan pembatasan sosial bukan menjadi perkara yang sulit, namun bagi mereka yang menggantungkan kehidupan pada pendapatan sehari-hari tentu akan muncul sudut pandang yang berbeda. Kelompok feminis selama ini berupaya untuk menyediakan informasi, akses, dan pelayanan bagi kelompok rentan yang terdampak pandemi seperti LGBT yang terancam kehilangan tempat tinggal, kelaparan, kekerasan dan berpotensi besar terserang virus. Meski begitu, mereka mengalami berbagai tantangan penolakan dari kelompok yang menentang keberagaman gender dalam upaya menegakkan HAM bagi kelompok LGBT yang tidak jarang memperlambat proses advokasi.

Melalui penelitian terdahulu, telah tertera berbagai pandangan mengenai kehidupan seorang transpuan dalam bertahan hidup di tengah kondisi yang tidak berpihak pada mereka. Hasil penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada bagaimana seorang transpuan yang masuk dalam kelompok gender minoritas harus menerima dampak negatif dari kondisi yang telah lama, baik secara struktural maupun kultural, menempatkan posisi mereka pada kondisi yang rentan. Mereka harus berhadapan dengan opresi, berkembangnya stigma dan sentimen, hilangnya jaminan perlindungan secara formal, dan terbatasnya akses bagi mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik karena dianggap “menyimpang.”

Dari penelitian yang cenderung berfokus pada dampak dari adanya masyarakat yang bertahan pada kondisi seksisme yang berpihak pada kelompok cisgender, ditambah dengan adanya kondisi pandemi yang justru

memperburuk kondisi kehidupan mereka, upaya *counter-hegemony* transpuan menjadi luput dari pembahasan mengenai perlawanan apa yang telah dilakukan kelompok transpuan dalam upaya memenuhi hak-hak mereka dalam memperoleh jaminan bertahan hidup pada masa pandemi Covid-19 di negara yang selama ini menghegemoni mereka. Penelitian terdahulu juga belum banyak membahas mengenai upaya membangun kesadaran kolektif agar kelompok transpuan menyadari adanya kekuatan dalam diri mereka dalam melakukan perlawanan terhadap pemikiran *mainstream* masyarakat yang mengecam mereka sekaligus pemangku kebijakan agar mulai memperhatikan hak mereka, tidak hanya pada pandemi Covid-19, namun juga pada jangka panjang.

I.5.2. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini digunakan teori kesadaran kolektif oleh Emile Durkheim yang dianggap memiliki relevansi dalam membantu peneliti menganalisis fokus penelitian dari topik mengenai upaya membangun kesadaran kolektif kelompok transpuan di Surabaya yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan bentuk-bentuk resistensi dalam memperjuangkan kesetaraan bagi kelompoknya di tengah pandemi Covid-19. Adapun teori *counter-hegemony* oleh Antonio Gramsci juga digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami upaya yang dilakukan kelompok transpuan dalam melawan sistem yang memposisikan mereka sebagai kelompok terhegemoni yang tidak layak untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat karena identitas gender dan orientasi seksual *non-biner* yang dianggap menyimpang.

I.5.2.1. Teori *Counter-hegemony*

Antonio Gramsci, seorang filsuf sekaligus pendiri Partai Komunis Italia, menggagas sebuah teori praktis yang dimunculkan berdasarkan refleksinya terhadap kegagalan partai komunis yang ia pimpin dalam

melakukan transformasi politik di Italia. Melihat bagaimana kelompok fasis mampu mempertahankan status-quo politiknya, Gramsci menjadikan fenomena tersebut sebagai batu pijakan yang membantu ia dalam memahami timbulnya hegemoni dalam suatu masyarakat (Priyadi, 2008).

Hegemoni sendiri dijelaskan oleh Gramsci dalam Phillips (S. R. Phillips, 1991) merupakan konsep yang menjelaskan keadaan dimana suatu kelas yang terdiri atas anggota-anggota yang memiliki kekuasaan lebih memaksakan atau mendominasi ‘cara hidup’ ke dalam setiap bidang kehidupan masyarakat baik dari sisi sosial, ekonomi, moral, dan politik sekelompok manusia yang ter subordinasi. Bentuk hegemoni bisa menjadi sangat beragam namun bentuk yang umum ditemui merupakan adanya manipulasi kultur sosial yang meliputi kepercayaan, nilai, dan pengetahuan masyarakat. Hegemoni ini hanya dapat dilakukan oleh kelas penguasa, sebagai pemilik kekuatan terbesar dengan didukung oleh adanya kapitalisme, dalam melakukan perubahan secara fundamental dan menciptakan kesadaran kolektif yang berbeda pula (Miles & Croucher, 2013)

Ide mengenai hegemoni membentuk tantangan bagi masyarakat untuk mampu melihat melalui ‘ilusi’ atau pandangan akan apa yang dianggap baik atau normal oleh kelompok *ruling class*. Masyarakat yang terhegemoni bisa saja menolak terjadinya hegemoni tersebut, mereka tentunya diharapkan untuk memiliki kapasitas berpikir kritis tentang pandangan yang dipaksakan kepada mereka, oleh karena itu Gramsci muncul dengan ide tentang *counter-hegemony*. Gramsci menjelaskan bagaimana *civil society* (terdiri atas pemerintah yang berkuasa atau *ruling class*) memiliki peran sebagai agen yang mampu menciptakan ataupun meruntuhkan status-quo untuk menciptakan orde sosial baru. *Civil society* mampu turut andil dalam melakukan hegemoni, namun di satu sisi juga mampu menciptakan munculnya

perjuangan kelas dari masyarakat yang terhegemoni dengan melakukan *counter-hegemony*.

Menurut Gramsci dalam teorinya, ia memberi solusi untuk melakukan *counter-hegemony* yaitu dengan menitikberatkan pada sektor pendidikan, atau langkah-langkah persuasi lewat kampanye hingga advokasi yang mampu membekali kelompok terhegemoni dengan kemampuan dan kesadaran berpikir kritis juga sistematis (Siswati, 2018). Hegemoni yang telah berjalan dalam waktu yang begitu lama akan memberikan pemahaman mengenai yang dianggap paling ‘benar’ sehingga kelompok yang terhegemoni menganggap bahwa pemaksaan pandangan tersebut kepada mereka merupakan hal yang ‘sah-sah’ saja untuk diterima, atau dipahami sebagai *common sense* (Fauziyah, 2018).

Lewat bukunya yang berjudul *Prisoner Notebook*, Gramsci menyatakan bahwa hegemoni dapat terjadi melalui dua tingkatan, yaitu superstruktur yang melibatkan negara dan masyarakat sipil yang mampu mendominasi masyarakat lainnya melalui metode yang persuasif, kemudian *direct nomination* sebagai bentuk hegemoni yang koersif (Gramsci, 1971). Oleh karena itu, *War of position* dicetuskan oleh Gramsci sebagai suatu hal yang perlu ditekankan dalam melakukan *counter-hegemony* karena sifatnya yang dapat menumbuhkan solidaritas dalam melawan hegemoni. *War of position* dalam Cox (1983) menekankan adanya ‘pertarungan’ pada wilayah masyarakat sipil sebagai gerakan awal sebelum melakukan ‘pertarungan’ melawan negara. Apabila masyarakat sipil dapat ditaklukan, maka masyarakat terhegemoni akan memiliki potensi dalam menciptakan perubahan terhadap *common sense* masyarakat sipil yang mulanya menormalisasi hegemoni, berubah menjadi bagian dari dilangsungkannya *counter-hegemony*.

Terdapat dua bentuk *counter-hegemony* yang dapat dilakukan sebagai sebuah aksi, *pertama* yakni *counter-hegemony* pada tahap *national-popular* sebagai gerakan yang bertujuan untuk membangun kekuatan massa dan membangun kesadaran masyarakat mengenai adanya hegemoni yang keliru pada skala nasional. Apabila tahap *national-popular* telah tercapai, maka aksi *counter-hegemony* dapat dilanjutkan pada bentuk kedua, yakni *internationalist*. *Counter-hegemony internationalist* merupakan upaya untuk membangun kesadaran pada skala yang lebih luas lagi yakni dengan melibatkan negara-negara lainnya yang di dalamnya turut mengalami bentuk hegemoni yang serupa. Agar *counter-hegemony* dapat dilaksanakan dengan baik, perlu dibangun sebuah kesadaran kelas khususnya bagi kelompok masyarakat yang tertindas.

Dalam upaya mencapai kesadaran kelas, Gramsci menekankan pentingnya kemampuan untuk berpikir secara kritis dan intelektualitas sebagai dasar dari aksi atau gerakan yang akan dilakukan dalam melawan hegemoni dari kelas penguasa. Kelompok masyarakat terhegemoni sangat lekat dengan sentimen bahwa mereka tidak cukup pintar atau tidak cukup berdaya untuk berhadapan dengan kelas penguasa, sehingga kemajuan intelektual dari para masyarakat tertindas menjadi hal yang krusial untuk dicapai.

Teori ini dapat membantu peneliti dalam menganalisis kelompok transpuan sebagai korban atas terjadinya hegemoni mengenai heteronormativitas dan cishnormativitas. Hegemoni ini menganggap bahwa di dunia ini hanya terdapat gender yang bersifat biner sehingga menyebabkan munculnya proses naturalisasi atas norma-norma heteroseksual yang dilanggengkan dalam waktu yang lama (Kartiningdryani, 2019). Studi sosiologi memunculkan apa yang dikenal sebagai *heterosexism* juga *cissexism* sebagai sistem tindakan yang menimbulkan terjadinya diskriminasi terhadap kelompok gender

atau seksualitas *non-female-male* dikarenakan adanya bias yang cenderung berpihak pada heteronormativitas (S. R. Phillips, 1991).

Kelompok transpuan selama ini menerima begitu banyak dari adanya hegemoni yang memposisikan mereka sebagai sekelompok individu yang dengan patologi sosial, tidak bermoral, mengalami penyimpangan, dan dipandang rendah. Melihat dampak hegemoni yang kemudian berpengaruh pada berkembangnya diskriminasi dan ketidakadilan bagi mereka dalam memperoleh hak sebagai warga negara atau citizen di Indonesia yang patut dilindungi, teori *counter-hegemony* ini berusaha memahami dan melihat upaya perlawanan mereka untuk membebaskan diri dari opresi hegemoni dan melawan pemikiran heteronormativitas (sebagai *subaltern consciousness*) yang semakin banyak ditemui di masa pandemi Covid-19.

1.5.2.2. Teori Kesadaran Kolektif

Emile Durkheim melalui salah satu karyanya yang berjudul *The Division of Labor in Society*, Durkheim membahas mengenai pembagian atau spesialisasi pekerjaan dan kondisi solidaritas masyarakat. Pada karya tersebut lebih lanjut dibahas mengenai apa yang Durkheim sebut dengan kesadaran kolektif atau *collective consciousness*. Tesis mengenai kesadaran kolektif muncul dari pertanyaan Durkheim mengenai faktor apa yang kemudian dapat menjadikan sekelompok individu menjadi saling terikat satu sama lain. Kesadaran kolektif dipahami sebagai seluruh kepercayaan, sikap, pengetahuan, dan perasaan bersama, keduanya disetujui dalam sebuah masyarakat yang kemudian membentuk suatu sistem yang dianggap umum (Ritzer, 2012). Kesadaran kolektif menimbulkan rasa saling memiliki seorang individu dengan kelompoknya selayaknya suatu masyarakat atau kelompok sosial.

Kesadaran kolektif terdiri atas bentuk dan konten yang bervariasi disesuaikan dengan apakah masyarakatnya memiliki solidaritas yang bersifat mekanis atau organik antar satu sama lain. Umumnya bagi masyarakat yang memiliki kesamaan latar belakang, pada kasus ini adalah persamaan nasib sebagai kelompok transpuan, mereka akan memiliki kesadaran kolektif untuk membangun sikap yang solider. Kesadaran kolektif sendiri mengacu pada bentuk-bentuk aturan keyakinan/keagamaan, gagasan, aturan sikap baik dan buruk, dan pengetahuan umum yang dianggap sebagai konsensus dalam suatu masyarakat. Kesadaran kolektif memiliki perbedaan dengan kesadaran individual karena kedua hal tersebut berasal dari dua kenyataan berbeda. Kesadaran kolektif memiliki dua sifat, yakni: *eksterior* dimana ia berada di luar masyarakat dan masuk ke dalam individu melalui wujud aturan moral dan aturan agama; dan *constrain* dimana ia memiliki daya untuk menekan dan memaksa masyarakat.

Terdapat empat dimensi dari wujud kesadaran kolektif sebagaimana dijelaskan oleh Durkheim. *Volume*, mengacu kepada seberapa banyak individu atau seberapa besar kelompok masyarakat yang mampu merasakan adanya kesadaran kolektif. *Intensitas*, memperhatikan sejauh atau sedalam apa kemampuan individu dalam merasakan adanya kesadaran kolektif. *Rigiditas*, mengacu pada seberapa jelas seorang individu atau sekelompok masyarakat mendefinisikan bentuk kesadaran kolektif yang mereka rasakan. Terakhir, *konten* yang melihat perwujudan nyata dari bentuk dirasakannya kesadaran kolektif (Damsar, 2015).

Kesadaran kolektif ini kemudian bersifat mengikat suatu masyarakat, namun ia tidak bergantung pada perubahan yang terjadi pada masyarakat. Melalui kesadaran kolektif, nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi suatu masyarakat dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Durkheim kemudian memandang apabila masyarakat berhasil patuh dan

mampu menyelaraskan diri pada kesadaran kolektif, maka masyarakat akan mampu menciptakan apa yang dinamakan dengan integrasi sosial sekaligus membentuk masyarakat yang fungsional. Berlaku sebaliknya, apabila suatu masyarakat gagal untuk menyesuaikan diri dengan kesadaran kolektif yang berlaku di sekitarnya dan melakukan pelanggaran, maka terdapat hukuman atau sanksi sosial bagi anggota masyarakat yang bersangkutan. Durkheim juga turut menjelaskan peran penting kehadiran sebuah kesadaran kolektif bagi sekelompok masyarakat sebagai salah satu cara untuk menghindari perpecahan atau ‘disrupsi’ akibat adanya koersi dari pihak berkuasa (Ridenour-jones, 1994).

Kesadaran kolektif perlu dibangun sebagai penanda adanya penyadaran dalam diri kelompok minoritas bahwa selama ini mereka telah menjadi korban dari adanya opresi sosial, atau ditempatkan pada posisi tertindas. Pada penelitian ini, kesadaran kolektif kelompok transpuan memegang peran penting guna membangun integrasi – kekuatan komunitas yang nantinya akan berguna untuk digunakan dalam upaya melakukan perlawanan terhadap sistem yang selama ini menindas mereka, lebih-lebih pada upaya melawan *gender norms* yang sangat biner. Tanpa adanya kesadaran ini, tentunya perjuangan individual seorang transpuan tidak akan menerima dampak yang begitu signifikan apabila dibandingkan dengan gerakan komunitas dengan jumlah massa dan suara yang lebih besar. Teori ini juga turut mendukung tesis yang disampaikan oleh Gramsci mengenai upaya *counter-hegemony* yang membutuhkan adanya kesadaran kolektif dari masyarakat termarginalkan agar melalui solidaritas yang mereka miliki, dapat terbangun sebuah mobilisasi gerakan berbasis kebutuhan kolektif.

I.5.2.3. Teori *Queer*

Pada karya yang berjudul “*Gender Trouble*” Judith Butler, seorang filsuf yang berasal dari Amerika Serikat menjelaskan bahwa

gender merupakan hasil dari adanya konstruksi budaya, sehingga gender tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang “*fixed*.” Butler berargumen bahwa gender dikonstruksikan secara sosial melalui adanya sosialisasi alih-alih mengikuti gagasan konvensional mengenai gender yang biner dan berdampak pada munculnya diskriminasi terhadap kelompok masyarakat transgender. Butler memunculkan gagasannya mengenai gender dengan berkaca pada perkembangan feminisme yang berusaha menghancurkan paham bahwa seorang perempuan terlahir ke dunia mengalami berbagai bentuk diskriminasi karena jenis kelaminnya yang dianggap inferior. Melalui pengalamannya sebagai seorang aktivis gender, Butler mulai mengkonseptualisasikan perbedaan antara gender dan jenis kelamin, kemudian melakukan analisis terhadap kedua hal tersebut tidak hanya melihat pada dampaknya terhadap perempuan, namun juga bagi individu dengan gender yang lebih kompleks seperti transgender.

Butler memulai analisisnya dengan merefleksikan tulisan Simone de Beauvoir yakni *The Second Sex*. Beauvoir menyatakan bahwa pasca Perang Dunia Kedua, perempuan masih dianggap sebagai “*lesser knowers*” atau makhluk yang tidak berdaya karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan berpikir rasional. Beauvoir berargumen bahwa perempuan diciptakan atau dibentuk untuk menyenangkan laki-laki sehingga perempuan tidak pernah sepenuhnya memiliki eksistensi secara penuh. Perempuan merupakan kehadiran fisik yang mereka tinggali, namun perempuan tidak pernah sepenuhnya memiliki kebebasan untuk menjadi individu yang otonom karena seluruh hidupnya diciptakan untuk mengikuti norma sosial dan ekspektasi laki-laki atas apa yang disebut sebagai “perempuan yang utuh” (De Beauvoir, 2014). Beauvoir kemudian menjelaskan bahwa, “*Being a woman is neither natural nor pre-determined*” yang menandakan bahwa gender merupakan hasil dari bentukan sosial sehingga

keseluruhan ide bahwa gender merupakan hal yang tetap sangat perlu untuk didekonstruksi.

Butler melanjutkan dekonstruksi gender sebagaimana dijelaskan oleh Beauvoir dengan memberikan penjelasan mengenai baik gender maupun jenis kelamin adalah hasil dari adanya konstruksi sosial. Butler berpendapat bahwa masyarakat akan terus-menerus bertindak seolah-olah gender mereka adalah "kenyataan internal atau sesuatu yang mutlak benar tentang [mereka]" tetapi bagi Butler, gender memiliki sifat yang justru tidak stabil sebagai hasil dari sifatnya yang memaksa (ekspektasi masyarakat terhadap gender tertentu). Butler menegaskan bahwa gender dapat dipindah-pindahkan, berubah-ubah dan “merupakan fenomena yang selalu diproduksi” (Butler, 2007). Butler menyebutkan bahwa gender seorang individu tidak selalu konsisten atau linier dengan jenis kelamin biologis individu tersebut karena gender merupakan hasil bentukan dari adanya “pengulangan terus menerus dari serangkaian tindakan yang dikembangkan dan dinaturalisasi dari waktu ke waktu.”

Butler juga memperkenalkan gagasan *gender performativity* atau gender sebagai performatif. Dia berargumen bahwa gender, alih-alih menjadi kualitas penting yang mengikuti dari seks biologis, atau identitas yang melekat, adalah tindakan yang tumbuh dari, memperkuat, dan diperkuat oleh, norma-norma masyarakat dan menciptakan ilusi seks biner (Callis, 2009). Butler mengibaratkan bahwa seorang laki-laki hanya akan kemudian dianggap sebagai laki-laki sejati apabila ia berhasil mengadopsi sifat-sifat maskulin dan menyukai seorang perempuan, sedangkan perempuan hanya akan dianggap sebagai perempuan apabila ia memiliki sifat feminin dan kemudian berhasil membawa kehidupan baru ke dunia yakni dengan melahirkan. Dengan kata lain, daripada menjadi perempuan atau laki-laki, individu bertindak sebagai perempuan dan laki-laki, sehingga menciptakan kategori perempuan dan laki-laki. Jika seorang individu gagal melakukan atau

mengadopsi sifat-sifat dan keharusan yang melekat pada gender mereka, maka mereka menghadapi konsekuensi negatif (Morgenroth & Ryan, 2018).

Salah satu fokus utama dari teori *queer* sebagaimana dijelaskan oleh Butler adalah soal identitas gender sebagai suatu hal yang "fluid" dan gender merupakan hasil dari performa seseorang dalam menampilkan dirinya. Teori *queer* juga turut mendobrak batasan-batasan pada apa yang dikenal sebagai heteronormativitas mengingat *selfhood* atau bagaimana pembentukan identitas gender pada seorang individu sifatnya tidak *predetermined* namun dibentuk karena adanya kode sosial, sikap, aktivitas, dan kekuatan dalam masyarakat yang sifatnya selalu berubah sehingga identitas seorang individu dapat berubah dari waktu ke waktu dan bersifat sangat personal atau subjektif. Transgender acap kali menerima diskriminasi karena ekspresi gender mereka yang tidak sesuai dengan kategori biner sebagaimana banyak dipahami oleh masyarakat di sekitar mereka. Teori *queer* oleh Butler banyak membantu individu-individu yang identitasnya tidak jatuh pada kategori biner seperti para cisgender dalam mengidentifikasi gender dalam dirinya sendiri.

I.6. Metodologi Penelitian

I.6.1. Paradigma Penelitian

Metode kualitatif dalam penelitian ini dipilih karena menjadikan pemberian makna pada kehidupan seorang individu sebagai esensi dari pendekatan kualitatif. Metode ini mendukung upaya yang dilakukan peneliti untuk mengungkap bagaimana seorang individu, khususnya bagi mereka yang tinggal dalam kondisi yang dianggap berbeda dapat memberikan makna dalam kehidupan sehari – harinya. Pun juga metode penelitian kualitatif meyakini bahwa setiap individu berhadapan dengan realitas ganda dalam memilih tindakan sosial. Realitas ini terbangun atas

adanya pendapat subjektif yang muncul dalam diri individu. Pernyataan tersebut didukung oleh konsep *verstehen* atau *empathetic understanding* yang dikemukakan oleh Max Weber bahwa dalam mempelajari tindakan sosial maka seorang peneliti ilmu sosial harus mempelajari alasan atau motif pribadi yang mempengaruhi munculnya perasaan internal dalam diri individu, perasaan tersebut kemudian membimbing individu tersebut mengambil keputusan dalam menentukan tindakan yang akan ia pilih (Djamba & Neuman, 2002).

Paradigma definisi sosial sebagaimana dijelaskan oleh George Ritzer memusatkan perhatian pada aksi dan interaksi sosial yang dihasilkan melalui adanya proses berpikir. Diilhami oleh pemikiran Max Weber mengenai sosiologi sebagai ilmu yang berusaha memberikan pemahaman interpretatif dari tindakan sosial yang memiliki makna, paradigma definisi sosial menganggap suatu tindakan dianggap bersifat sosial sejauh tindakan tersebut memiliki makna subjektif yang melekat pada aktor yang melakukan tindakan tersebut (Ritzer, 1975).

Sejalan dengan dipilihnya paradigma definisi sosial, pada penelitian ini dipilih pendekatan fenomenologi sebagai pola berpikir yang bersifat subjektif, memandang atau menjelaskan suatu fenomena tidak hanya pada apa yang tampak, melainkan turut menggali makna di balik fenomena itu atau memahami *what's beyond the box* (Wirawan, 2012) Pendekatan fenomenologi berusaha mempertahankan bagaimana pengalaman seorang individu dapat menjadi masuk akal bagi mereka yang memilih untuk menjalani pengalaman tersebut. Dengan menekankan pada “*reality of consciousness*,” fenomenologi akan membantu mengungkap kenyataan yang terdapat dalam interpretasi atau kesadaran individu dalam memandang pengalaman yang ia alami.

Kembali pada konsep *verstehen* yang berkaitan dengan pendekatan fenomenologi dalam memahami tindakan sosial seorang individu, Alfred Schutz berpendapat bahwa dalam fenomenologi terdapat tindakan yang

dimunculkan seorang individu dalam kehidupannya sehari – hari yang merupakan bagian paling penting untuk diamati dan dianalisis. Tindakan subjektif yang dimunculkan seorang individu atau aktor pelaku dinilai tidak muncul secara begitu saja, melainkan melalui proses panjang dengan memperhatikan kondisi sosial, norma, budaya, dan sejauh mana tingkat kemampuan aktor tersebut untuk memahami tindakannya (Wirawan, 2012).

I.6.2. *Setting Sosial*

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya yang membahas mengenai upaya *counter-hegemony* kelompok transpuan di Surabaya dalam menghadapi pandemi Covid-19, maka peneliti memilih individu – individu transpuan yang secara khusus terdampak atau terlibat dalam upaya melakukan *counter-hegemony* akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kondisi kehidupan mereka sehari – hari. Surabaya terpilih menjadi lokasi penelitian dengan mempertimbangkan alasan bahwa kota Surabaya merupakan pusat pergerakan pertama kelompok masyarakat minoritas gender selain di Jakarta. Pada sejarahnya, kota Surabaya telah menjadi pusat perkumpulan bagi para transpuan yang ingin mencari peruntungan hidup atau mencari *shelter* yang relatif aman sejak tahun 1978 di bawah naungan PERWAKOS.

Oleh alasan tersebut peneliti memilih PERWAKOS sebagai *setting* sosial penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, PERWAKOS merupakan organisasi pertama di Indonesia dan Surabaya yang menyediakan ruang aman bagi transpuan untuk berkomunitas serta berekspresi. Kedua, PERWAKOS juga merupakan organisasi terbesar di Surabaya yang hingga saat ini masih secara rutin memetakan pergerakan transpuan di Surabaya dan memiliki pendataan yang baik atas anggotanya. Ketiga, PERWAKOS mampu memberikan data mengenai kehidupan transpuan yang terdampak oleh pandemi. Dengan banyaknya kontribusi PERWAKOS dalam memperbaiki kehidupan transpuan yang

berada di bawah naungannya, diharapkan pemilihan PERWAKOS sebagai *setting* sosial dapat memberikan berbagai sudut pandang dan kekhasan terhadap data yang nantinya akan diperoleh melalui studi ini.

I.6.3. Penentuan Informan

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik di mana peneliti memilih informan berdasarkan dengan karakteristik-karakteristik yang sebelumnya telah ditentukan agar informan dapat memberikan informasi sesuai dengan topik pada penelitian yang sedang dilakukan (Eitikan, 2016). Peneliti memilih transpuan yang secara khusus telah terdaftar dalam PERWAKOS dikarenakan dalam pandemi ini tahapan dalam memobilisasi transpuan non-PERWAKOS menjadi rumit mengingat banyak dari mereka yang dalam seharinya lebih fokus bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. PERWAKOS memiliki kapasitas lebih dalam membantu menghubungkan peneliti dengan transpuan-transpuan lain yang masih dapat dijangkau oleh PERWAKOS dengan tetap mempertimbangkan kriteria yang telah ditentukan yakni:

- a. Transpuan berusia 30 sampai 60 tahun.
- b. Transpuan terdampak oleh pandemi (kehilangan pekerjaan, tidak menerima bantuan dari pemerintah, dan mengalami diskriminasi).
- c. Transpuan yang tinggal di Surabaya sebagai *homebase* PERWAKOS

Peneliti juga menggunakan teknik pemilihan informan dengan metode *snowball*. Teknik *snowball* mengacu pada tahapan mengidentifikasi, memilih, dan mengambil informan dalam suatu rantai hubungan menerus yang dimulai dengan *key-informan* atau subjek awal (Djamba & Neuman, 2002). Tahapan pemilihan informan dimulai dengan seorang informan pertama secara bertahap memberikan informasi atau petunjuk mengenai informan berikutnya yang dapat berpartisipasi dan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan berkompeten dalam menyediakan informasi atau data. Metode *snowball* dipilih khususnya karena peneliti

tidak memiliki kerangka sampel yang begitu luas sehingga membutuhkan subjek awal untuk membantu menemukan lebih banyak informan yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam studi ini.

Terdapat enam informan yang terpilih dalam membantu berjalannya penelitian ini. Pada penelitian ini *key-informan* terpilih merupakan IM yang menjabat sebagai dewan pembina PERWAKOS yang pada beberapa kesempatan banyak berinteraksi dengan peneliti. Peneliti telah mengenal IM sejak tahun 2018 ketika peneliti dihubungkan oleh bapak peneliti yang telah lama aktif terlibat dalam upaya pemberdayaan bagi transpuan di Surabaya. IM merupakan anggota senior PERWAKOS sekaligus mantan wakil ketua PERWAKOS sehingga ia mampu memberikan data yang begitu lengkap pada lika-liku kehidupan transpuan di Surabaya. Peneliti bertemu dengan IM pada tempat tinggal pribadinya di Jalan Pacar Kembang yang juga bersebelahan dengan rumah singgah sekaligus kantor PERWAKOS. IM kemudian menghubungkan peneliti dengan dua informan lainnya yaitu informan FY dan informan SA.

Informan kedua adalah FY yang peneliti temui setelah dihubungkan oleh informan IM. FY bertugas sebagai petugas lapangan PERWAKOS sekaligus humas yang selama ini bertanggungjawab sebagai penghubung bagi PERWAKOS dengan LSM/*Stakeholder*/pihak eksternal lainnya. Peneliti menemui FY dan melakukan wawancara di kost pribadinya yang terletak di Jalan Sememi setelah sebelumnya berkomunikasi terlebih dahulu melalui telepon seluler. Pertemuan peneliti dengan FY turut mengantarkan peneliti dengan informan lainnya mengingat FY merupakan figur yang mampu memobilisasi para transpuan di Surabaya karena memiliki hubungan yang dekat.

Informan ketiga adalah DK. Peneliti memilih DK sebagai seorang informan setelah melakukan *research* melalui internet mengenai sepak terjang PERWAKOS dalam memperjuangkan hak transpuan. DK merupakan figur yang selama ini bergerak di balik layar dalam merancang

arah gerak PERWAKOS sebagai suatu organisasi serta melakukan pendataan terhadap transpuan-transpuan di Surabaya. DK bertempat tinggal di kantor milik PERWAKOS, namun karena informan sedang mengikuti pertemuan dengan LSM di Malang, wawancara dengan informan DK dilakukan melalui *video call* zoom.

Informan keempat adalah SA. SA merupakan sosok transpuan senior yang turut menjabat sebagai ketua PERWAKOS. Peneliti bertemu dengan SA dan melakukan wawancara di rumah singgah sekaligus kantor PERWAKOS yang berlokasi di jalan Pacar Kembang. Peneliti memilih SA sebagai informan dengan mempertimbangkan pengalaman SA sebagai seorang transpuan senior yang telah lama berkecimpung dalam organisasi PERWAKOS dan memiliki pemahaman akan sejarah pergerakan transpuan di Surabaya.

Informan kelima adalah ID. Informan ID merupakan salah satu informan yang peneliti kenal melalui SA. Informan ID merupakan seorang WPS atau Waria Pekerja Seks yang dulunya merupakan petugas lapangan PERWAKOS yang bertugas memberikan edukasi mengenai *safe sex* bagi WPS sekaligus melakukan pendataan terhadap transpuan yang tinggal di wilayah Surabaya timur. Peneliti memilih informan ID sebagai seorang informan dengan pertimbangan informan ID mampu memberikan sudut pandang berbeda dengan kisahnya sebagai seorang WPS dan penggerak transpuan di masa pandemi Covid-19. Wawancara dengan ID dilakukan di rumah singgah PERWAKOS sebagai *basecamp* para transpuan Surabaya di hari yang berbeda dengan informan SA.

Informan keenam adalah YT. Peneliti berkenalan dengan informan YT melalui informasi yang diberikan oleh informan SA dan FY. YT merupakan seorang transpuan yang belum melakukan proses *come out* di hadapan keluarganya yang kini tinggal di Gresik. YT memutuskan untuk pindah ke Surabaya untuk menghindari cemoohan keluarganya dan sejak saat itu ia bertransisi dan telah menjadi seorang WPS sejak awal

kedatangannya di Surabaya. Informan YT mulai aktif sebagai seorang petugas lapangan dan anggota Kelompok Dampingan PERWAKOS hingga saat ini. Peneliti memilih informan YT sebagai seorang informan dengan mempertimbangkan keaktifannya di PERWAKOS, juga karena tertarik dengan latar belakang pengumpulannya sebagai seorang WPS dan pengamen di masa pandemi yang di satu sisi masih belum sepenuhnya terbuka di lingkup keluarganya mengenai keputusannya bertransisi.

Setelah bertemu dengan keenam informan hingga kemudian peneliti mulai melakukan sesi wawancara mendalam dengan masing-masing dari mereka, peneliti menemui bahwa data yang telah diperoleh sudah berkategori jenuh yakni di mana data yang didapatkan tidak lagi memiliki perkembangan variasi jawaban. Peneliti melakukan proses wawancara serta melakukan observasi dengan melibatkan diri dalam kegiatan perkumpulan transpuan dalam jangka waktu dua bulan. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti telah mengumpulkan data yang kemudian dapat dilanjutkan pada tahapan analisis data untuk menjawab fokus penelitian sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.

I.6.4. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti memilih untuk melibatkan metode wawancara mendalam dan observasi sebagai tahapan mengumpulkan data. Wawancara mendalam atau biasa dikenal sebagai *indepth interview* merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terbangunnya percakapan intensif yang dilakukan antara peneliti dan informan. Wawancara mendalam dilakukan secara terbuka dengan panduan yang telah disediakan pada pedoman wawancara, hal tersebut dilakukan dengan maksud peneliti dapat memperoleh data dengan baik dan telah mampu menjawab seluruh kebutuhan peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Peneliti juga melakukan observasi sebagai teknik pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat keadaan fisik, perilaku sosial, serta kata-

kata yang terlihat dan terdengar yang kemudian dicatat sebagai data untuk dianalisis dalam menjawab fokus penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran mengenai realitas empirik yang ada, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan mengenai lingkungan yang menjadi objek kajian penelitian kualitatif agar diketahui batasan konsep yang hendak diteliti. Observasi partisipatoris dipilih sehingga peneliti dapat secara langsung terlibat dalam kehidupan kelompok yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Tipe observasi ini membantu peneliti untuk dapat memperoleh kelengkapan data yang lebih maksimal karena peneliti diberi kesempatan untuk secara langsung mengamati dan memahami tindakan yang dilakukan oleh informan, selain itu peneliti juga memiliki kesempatan untuk menginterpretasi makna yang terdapat dibalik tindakan tersebut (Emzir, 2012).

Untuk membantu proses *indepth interview* dan observasi agar dapat berjalan dengan baik sehingga data yang didapatkan oleh peneliti dapat menjadi lebih maksimal, dibutuhkan proses yang disebut sebagai *getting in*. Pada proses ini, mulanya peneliti harus mampu memperkenalkan diri pada lingkungan atau *setting* sosial yang akan diteliti sekaligus untuk menyampaikan maksud dan tujuan peneliti. Karena kepercayaan adalah faktor esensial yang dapat membantu peneliti untuk memiliki relasi yang baik dengan para informan, proses *getting in* menjadi salah satu tahapan yang tidak dapat diabaikan. *Getting in* umumnya melibatkan proses tawar – menawar yang tujuannya adalah untuk meyakinkan informan bahwa peneliti tidak akan melanggar privasi atau *confidentiality* informan, berupaya untuk mengekspos atau mencelakai informan, ataupun mengganggu kehidupan mereka sehingga mereka dapat membangun kepercayaan dan keterbukaan atas keyakinan bahwa peneliti tidak akan menjadi orang yang mengancam atau mudah menghakimi (Taylor et al., 2015).

I.6.5. Analisis Data

Setelah peneliti berhasil mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti akan melanjutkan pada proses penyusunan transkrip hasil wawancara mendalam yang telah diperoleh selama tahapan pengumpulan data. Data berupa transkrip secara lebih lanjut akan dikelompokkan atau dikategorisasikan berdasarkan perbedaan pada masing-masing jawaban informan dan kemudian diinterpretasi sesuai dengan teori yang digunakan peneliti dalam menuntun analisis data.

Dalam menganalisis data, menurut Sparingga (Azaria, 2005) peneliti akan memperhatikan makna-makna yang tidak terlihat atau tidak secara langsung ditunjukkan oleh informan. Melalui apa yang telah disampaikan oleh informan, peneliti akan melakukan interpretasi secara lebih mendalam untuk mampu memahami apa yang tidak secara gamblang diperlihatkan pada saat di lapangan. Peneliti juga memperhatikan bagaimana setiap informan adalah individu yang unik dan memiliki kemampuannya sendiri dalam menciptakan atau menginterpretasi lingkungannya, sehingga peneliti harus bersifat subyektif pada cara pandang yang dihasilkan oleh informan.